

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rasid. "Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Desa Saobi Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/25853/>.
- Anak Agung Ketut Sukranatha and Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran." *Jurnal Cakrawala Hukum* 9, no. 1 (June 2018).
- Anis Rohmatullah. "Prinsip Legalitas Dan Kekuatan Status Perkawinan Dibawah Tangan Pada Kartu Keluarga Dalam Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia." Universitas Islam negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Arso Sosroatmodjo dan A. Wait Aulawi. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986.
- Azura Wulandari and Irda Pratiwi. "Pencatatan Kelahiran Bagi Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya Studi Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil." *Ex-Officio Law Review* 2, no. 2 (June 2023).
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019.
- Departemen Agama. *Pedoman Pencatat Nikah*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo and LPPM IAIN Ponorogo. *Profil Anak Kabupaten Ponorogo*. Ponorogo: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo, 2022.
- Dispendukcapil Lumajang. "Seberapa Penting Akta Kelahiran Bagi Anak," March 8, 2023. <https://lumajangkab.go.id/berita-opd/detail/2661#:~:text=Selain%20sebagai%20identitas%20anak%20dan,juga%20pengurusan%20hak%20ahli%20waris>.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Faida Fidiani. "Implementasi Administrasi Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Kartu Keluarga (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.
- Gustav Radbruch. *Legal Philosophy, in The Legal Philosophies Of Lask, Radbruch, and Dabin*. Cambridge: Harvard University Press, 1950.
- Hadi S. "Urgensi Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 2 (2018).
- Ida Bagoes Mantra. *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Indah Permata Sari and Siti Ummu Adillah. "Tinjauan Yuridis Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang." *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 4 Universitas Islam Sultan Agung Semarang* 1, no. 1 (Oktober 2020).
- Ira Azahrya, Muhammad Tahir, and Muhammad Yahya. "Implementasi Program Penerbitan Akta Kelahiran Berbasis Online Pada Dinas Kependudukan Dan

- Pencatatan Suipil Kabupaten Tana Taroja.” *Journal Unismuh* 4, no. 2 (April 2023).
- Iwan Kustiawan, Nurmuttaqin, and Ai Romlah. “Tinjauan Sosiologis Terhadap Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Dan Cerai Hidup Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Sebagai Akibat Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Di Kota Banjar.” *Case Law* 3, no. 2 (July 2022).
- Jazim Hamidi. *Hermeneutika Hukum*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011.
- Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) (1990).
- Khairuddin Nasution. *Status Wanita Di Asia Tenggara*. Jakarta: INIS, 2002.
- Lidwina Tuto Ladar, Shelomita Putri Amelia, Aurelya Putri Alzahrah, Meidina Aulia, Deliana Rinasari Ghufriani, and Dwi Aryanti Ramadhani. “Implikasi Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan Terhadap Pencatatan Akta Kelahiran Anak.” *TERANG : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2 (September 2024).
- M. Bakri. *Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi Jilid 1*. Malang: UB Press, 2016.
- M. Ghufuran H and Kordi K. *Hak Dan Perlindungan Anak Di Atas Kertas*. Jakarta: PT Perca, 2010.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan 1*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2020.
- . *Ilmu Perundang-Undangan 2*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2020.
- Mohammad Wildan Raja Mahasina. “Pemberian Hak Administrasi Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.
- Neng Djubaedah. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Nurlian M. Lahati and Zulkarnain Suleman. “Penerbitan Akta Kelahiran Anak Di Luar Perkawinan.” *As-Syams : Journal Hukum Islam* 1, no. 1 (Agustus 2020).
- Ombudsman. “Ombudsman RI Tegaskan Urgensi Akta Kelahiran Dalam Pengembangan Kualitas SDM Di Padang,” August 15, 2024. <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-tegaskan-urgensi-akta-kelahiran-dalam-pengembangan-kualitas-sdm-di-padang#:~:text=%22Akta%20lahir%20jangan%20dianggap%20sepele,penidikan%20dan%20kesehatan%2C%22%20tegasnya>.
- Otong Syuhada. “Karakteristik Negara Hukum Pancasila Yang Membahagiakan Rakyatnya.” *Presumption of Law Fakultas Hukum Universitas Majalengka* 3, no. 1 (April 2021).
- Padurariu and Loana. “The Principle of The Best Interest of The Child.” *Lex ET Scientia International Journal* 2, no. XXVII (2020): 7–13.

- Pengadilan Agama Tangkasbitung. "Akibat Perkawinan Tidak Tercatat (Nikah Sirri/Nikah Urf)," August 5, 2024. <https://pa-rangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-artikel/627-akibat-perkawinan-tidak-tercatat-nikah-sirri-nikah-urf#:~:text=Salah%20satu%20akibat%20yang%20disebabkan,sebagai%20akibat%20dari%20perkawinan%20tersebut.>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (2019).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1975).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (2018).
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian Di Indonesia Dan Belanda*. Surabaya: Airlangga University Press, 1996.
- Rachmadi Usman. *Hukum Pencatatan Sipil*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.
- . "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14, no. 03 (September 2017).
- Ratnasari. "Perkawinan Dan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Indonesia: Suatu Tinjauan Hukum." *Jurnal Hukum* 23, no. 3 (2021).
- Rian M. Sirat. "Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal JURISTIC* 1, no. 1 (April 2021).
- Setiawan. "Akibat Hukum Dari Tidak Dapatnya Pencatatan Perkawinan." *Jurnal Penelitian Hukum* 21, no. 1 (2020).
- Sheyla Nichlatus Sovia, Abdul Rouf Hasbullah, Andi Ardiyan Mustakim, Setiawan, Mochammad Agus Rachmatulloh, Pandi Rais, Moch Choirul Rizal, et al. *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022.
- Soerjono Soekanto and Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Grafindo Media Pratama, 2010.
- Supomo. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1971.
- Syahrani. "Kebijakan Kementerian Agama Dalam Memberikan Layanan Nikah Bagi Daerah 3T Di Kabupaten Pulang Pisau." *Jurnal Cahaya Mandalika* 3, no. 3 (March 26, 2024).
- Taufiqurrahman Syahuri. *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Tedjo Asmo Sugeng. "Pentingnya Akta Kelahiran Sebagai Identitas Anak Yang Dilahirkan." *Jurnal Fenomena* 21, no. 2 (November 2023).
- "Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (Diterjemahkan Dari Buku Hans Kelsen, Generaly Theory of Law and State; New York: Russel and Russel, 1971)." Bandung: Nusa Media, 2014.
- Tim KPAl. "Akta Kelahiran Adalah Hak Setiap Anak Indonesia, Batalkan UU Yang Persulit Pembuatan Akta Kelahiran," 2013. <https://www.kpai.go.id/publikasi/tinjauan/akta-kelahiran-adalah-hak->

setiap-anak-indonesia-batalkan-uu-yang-persulit-pembuatan-akta-kelahiran.

Ubaiyana and Mar'atun Fitriah. "Kedudukan Peraturan Menteri Sebagai Bagian Dari Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan UU 12/2011." *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada* 33, no. 2 (2021): 599–623.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (2011).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (2019).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (2006).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (2014).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (n.d.).

Wilbert D. Kolkman, dkk. *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia*. Denpasar: Pusaka Lasaran, 2012.